

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Meski demokrasi secara substansial dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalankan pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal Pemilihan Umum pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada 2014 lalu. Pemilihan Umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde Baru ketika Presiden Soekarno menjabat dengan keikutsertaan empat partai besar yakni PNI, NU, PKI dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII.¹ Setelah masa Pemilu Orde Lama, Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika Orde Baru dengan keikutsertaan sepuluh partai.² Setelah serangkaian pemilu yang ‘dikuasai’ oleh Orde Baru dengan hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar. Fase reformasi membawa Indonesia pada Pemilu 1999, dimana partai dikembalikan pada fungsi awalnya. Kemudian diadakan kembali pada 2004 dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung.

¹ Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1981). Hal. 307

² Kemenkumham. *Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.9 No.4 Desember 2014. Hal.509.

Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (mencakup pemilu kepala daerah), Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³ Keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui.

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum, dimana dijelaskan dalam undang- undang ini bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilu (Pemilihan Umum)⁴. Undang-undang No 7 Tahun 2017 ini mempertahankan sistem pemilu yang digunakan pada tahun 2014, dengan menggunakan sistem proposional terbuka, dimana pemilih dapat memilih langsung calon yang mereka inginkan dari daftar nama calon yang diajukan partai-partai para calon kemudian diurutkan berdasarkan jumlah suara.

³Rumah Pemilu.2014. “Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014”. Diakses pada <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>.

⁴ Undang-undang Republik Indonensia Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administrative setempat yang telah memenuhi persyaratan. Menurut Suryono Untoro mengenai pilkada: “Pilkada ialah suatu pemilihan yang dilakukan oleh rayat Indonesia, terutama rakyat yang telah memiliki hak pilihnya yang digunakan untuk memilih wakil-wakilnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).”

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (bupati, walikota, dan gubernur) dipilih langsung oleh rakyat, dimana rakyat diberi kesempatan langsung untuk dapat memilih secara langsung bupati dan wakilnya dengan pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing pemilih. Dalam partisipasi masyarakat yang melakukan pemilihan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis terhadap budaya dan perilaku memilih yakni kelas sosial, ekonomi, agama, etnis, gender, dan juga aspek daerah tempat tinggal.

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan sebuah daerah otonomi baru di Sumatera Selatan yang merupakan pemekaran dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Musi Rawas. Ibu kota Kabupaten Musi Rawas Utara berpusat di Rupit. Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) diresmikan pada tanggal 10 Juli 2013, dan disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, termuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 dan dibawah kepemimpinan Drs. H. Akisropi Ayub S.H.,M.Si yang dilantik Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia sebagai pejabat Bupati Musi Rawas Utara, dan dengan jumlah penduduk 195.689 jiwa.⁵

Kabupaten Musi Rawas Utara itu sendiri memiliki 7 kecamatan yaitu: Kecamatan Rawas Ulu berpusat di Surulungan Rawas, Ulu Rawas berpusat di Muara Kulam, Rawas Ilir berpusat di Bingin Teluk, Nibung berpusat di Nibung, Karang Dapo berpusat di Karang Dapo, dan Rupit berpusat di Muara Rupit. Disini peneliti meneliti salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Kecamatan Ulu Rawas, dimana Kecamatan Ulu Rawas memiliki 7 desa dan berpusat di Kelurahan Muara Kulam.

Kecamatan Ulu Rawas merupakan salah satu Kecamatan termuda di Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten ini berdiri pada April 2004 yang merupakan wilayah bagian dari Marga Ex Ulu Rawas. Kecamatan Ulu Rawas merupakan salah satu kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas Utara. Luas total Kecamatan Ulu Rawas adalah sebesar 1452,88 (km² . Secara geografis Ulu Rawas terletak pada 102°4'0'' BT-103°22'13'' BT dan 2°19'15'' LS-3°6'30'' LS. Sebelah Utara Ulu Rawas berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rawas Ulu sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karang Jaya.⁶

Kecamatan Ulu Rawas memiliki perekonomian yang sangat pesat terletak dibagian Hulu aliran Sungai Rawas membuat daerah ini menjadi subur dengan hasil pertaniannya. Sistem ladang/ huma merupakan penanaman padi tradisional

⁵<https://muratarakab.go.id/page/sejarah-singkat-kabupaten-musi-rawas-utara>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2021, pukul 14.26

⁶ Kecamatan Ulu Rawas Dalam Angka Ulu Rawas *Subdistrict in Figures* 2019

yang masih dilanjutkan secara turun temurun. Selain ladang pendulangan emas secara tradisional merupakan penghasilan utama bagi masyarakat Kecamatan Ulu Rawas.

Dalam hal ini Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara telah ikut ambil dalam ajang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah setempat dari tahun 2015 dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 9.025, sebaliknya jumlah daftar suara pemilih sebanyak 8.015 suara dan pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada di Kabupaten Musi Rawas Utara di ikuti juga oleh 3 pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yaitu paslon Syarief Hidayat-Surian, Devi Suhartoni-Inayatullah dan Akisropi Ayub-Baikuni.

Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. Jumlah Daftar Pemilih Tetap yang di keluarkan di Kecamatan Ulu Rawas pada tahun 2020 sebanyak 9.310 orang. Sebaliknya, pada 9 Desember 2020 Pemilihan Kepala Daerah jumlah suara pemilih sebanyak 8.076. (KPU: 2020).⁷ Jumlah suara yang cukup banyak di Kecamatan Ulu Rawas menjadi rebutan oleh para kandidat. Suara pemilih ini, terbagi di tujuh Desa (Jangkat, Pulau Kidak, Sosokan, Kuto Tanjung, Muara Kulam , Napalicin dan Muara Kuis). Lima Desa di menangkan oleh pasangan no urut. 01 Devi Suhartoni-Inayatullah dan (Dua Desa lainnya di menangkan oleh pasangan no urut. 03 Drs. H.M. Syarif Hidayatullah- Surian.

Sedangkan jumlah suara keseluruhan pada saat pilkada 2020 Kabupaten Musi Rawas. Pasangan 01. Devi Suhartoni- Innayatullah mendapat perolehan

⁷ <https://pilkada2020.kpu.go.id/muratarakab>

suara sebanyak 49.109 (43,43%) suara , mengungguli pasangan lainnya 02. Drs. Akisropi Ayub- Baikuni 23.852 (21,09%) suara dan 03. Drs. H.M. Syarif Hidayatullah- Surian dengan perolehan suara 40.126 (35,48%) suara.⁸ Dengan demikian hasil dari perhitungan TPS, maka pasangan Devi Suhartoni-Innayatullah keluar sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak pada pemilihan bupati Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2020-2025. Jika dianalisa lebih jauh kemenangan Devi Suhartoni- Innayatullah memang terdapat di Kecamatan Ulu Rawas yang daerahnya tidak terlepas dari faktor sosiologis, dimana keikutsertaan seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilu tidak terlepas dari adanya kesamaan etnis antara pemilih dengan pasangan calon. dari data diatas bahwa keikutsertaan seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilu sangat tinggi yaitu 9.310 orang, walaupun kebanyakan masyarakatnya yang mata pencariannya dominan petani dan pendidikan yang tergolong rendah. Maka dari itu dapat kita pahami bahwa budaya politik masyarakat Kecamatan Ulu Rawas bervariasi. Variasi tersebut antara lain budaya politik parokial, subjek, dan partisipan. Namun, pola budaya masyarakat Kecamatan Ulu Rawas mengarah pada budaya parokial dimana tipe budaya politik yang memiliki jangkauan partisipasi yang terbatas hanya dalam wilayah yang terbatas dan sempit, sifat budaya politik ini cenderung kedaerahan atau regional. Masyarakat di daerah tersebut kurang antusias untuk berpartisipasi dalam kepentingan politik yang lebih luas. Orientasi dan sistem politik masyarakatnya masih rendah.

⁸ <https://musirawasutara.kpu.go.id/>.

Budaya politik masyarakat adalah budaya politik campuran, sebuah kombinasi dari budaya politik, parokial, kaula dan partisipan. Dalam pilkada 2020 sikap politik masyarakat ditunjukkan dengan partisipasi memilih mencapai 70 persen dengan indikasi yang cukup tinggi, tetapi sisi lain banyaknya gugatan yang mengindikasikan banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang menunjukkan lemahnya nilai politik masyarakat.

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, mekanisme penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Budaya politik bukan saja merefleksikan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, tapi budaya politik dapat mencerminkan suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan publik untuk masyarakat.⁹

Dengan demikian, budaya politik tidak terlepas dari perilaku memilih masyarakat. Perilaku memilih masyarakat pada dasarnya saling berkaitan antara budaya politik yang ada di masyarakat, karena perilaku memilih merupakan sikap masyarakat untuk memberikan suara dan menentukan calon siapa yang akan dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati dalam pilkada secara langsung. Sehingga, budaya politik yang ada pada masyarakat juga mempengaruhi perilaku pemilihannya.

⁹ Hening Suryo. *Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang : Suatu Perbandingan. Jurnal Transformasi 1* (27): 1-47. 2015.

Peneliti berasumsi bahwa dari data awal yang diperoleh, memperlihatkan adanya kecenderungan bentuk budaya politik subyek di masing-masing kelompok etnis masyarakat pada Pilkada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020, dimana adanya kecenderungan orientasi politik masyarakat yang cukup mengetahui dan cukup menaruh perhatian terhadap aktivitas politik pada Pilkada, namun masih lebih menonjolkan aspek emosional/perasaan, khususnya keterkaitan emosional etnis yang sama dengan etnis pasangan calon, sehingga orientasi politik mereka untuk terlibat karena adanya afiliasi etnis yang kuat dengan pasangan calon, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun evaluatif, dan kecenderungan partisipasi politik mereka lebih bersifat mobilisasi berdasarkan sentimen etnis.

Berdasarkan paparan diatas penulis memiliki ketertarikan untuk melihat budaya politik masyarakat Ulu Rawas. Secara Umum Ulu Rawas merupakan gabungan dari 3 Kebudayaan yang berbeda yakni Rejang, Rawas dan Jambi. Wilayah Rejang memiliki kebudayaan tersendiri yang wilayahnya mencakup Kelurahan Muara Kulam, Napalicin, Sosokan dan Muara Kuis. Wilayah Kebudayaan Rawas meliputi Desa Pulau Kidak dan Wilayah Kebudayaan Jambi meliputi Desa Jangkat. Budaya politik dalam masyarakat Ulu Rawas sangat unik untuk dikaji secara umum dari faktor pendidikan Ulu Rawas dapat dikatakan memiliki tingkat pendidikan terendah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan demikian pengkajian budaya politik pada kecamatan ini merupakan kajian yang serius untuk di perdalami.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, maka peneliti mengadakan serangkaian penelitian. Dalam penelitian ini peneliti meneliti budaya politik

Kecamatan Kabupaten Musi Rawas. Dari latar belakang masalah di atas peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyelesaikan skripsinya yaitu dengan judul penelitian “ Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020”.

Untuk lebih menunjang penelitian ini peneliti perlu menjadikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi. Penelitian yang menjadi referensi yang fokus pada budaya politik suatu masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- Penelitian Huzer Apriansah (Fisip Undip 2005), penelitian ini berjudul Budaya dan Perilaku Politik Masyarakat Pengikut Saminisme (Studi Kasus di Dusun Klop Duwur Desa Klop Duwur Kecamatan Banjarejo dan Dusun Ploso Wetan Desa Kediren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah), penelitian ini berfokus pada budaya politik dan perilaku politik masyarakat pengikut saminisme. Saminisme adalah gerakan reaksi sosial masyarakat petani di Blora yang mengikuti ajaran Samin Surosentiko. Gerakan ini merupakan bentuk reaksi atau rusaknya tatanan sosial budaya lokal mereka, kerusakan tersebut disebabkan campur tangan budaya dan politik dari kolonial belanda dan ketertekanan ekonomi pada akhirnya muncullah keinginan untuk kembali pada tatanan awal atau tatanan yang dibangun oleh leluhur. Saminisme pada tingkat tujuan berupaya menciptakan rumus politik dalam rangka mengorganisasikan wadah perjuangan untuk membentuk suatu masyarakat baru yang memiliki norma sosial yang tersendiri. Contoh dari pengikut ini Dusun Klop Duwur dimana masyarakatnya memiliki kewajiban sosial lainnya yang

terbentuk keharusan membayar pajak dan kerja tanpa upah. Metode penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa masyarakatnya pengikut saminisme yaitu subyek parokial.

- Penelitian Nia Kurniawati (Unnes 2011), penelitian ini berjudul Budaya Politik Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Penelitian ini berfokus pada Tipe budaya politik, hubungan masyarakat, dan struktur sosial Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Metode yang digunakan yaitu metodologi kualitatif. Pada dasarnya masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak memiliki kecenderungan kearah tipe budaya politik parokial-partisipan merupakan kecenderungan kebudayaan politik yang terjadi di negara berkembang. Karena hampir semua negara berkembang memilki unsur budaya parokial yang kuat, contohnya saja ketika pembagian bantuan sosial dari masyarakat ada seorang warga miskin yang tidak terima. Warga tersebut kemudian melayangkan komplain kepada petugas bansos meskipun ia tidak terdata karena berkas-berkas keluarganya tidak lengkap ia pun enggan mengurusnya ke kantor pemerintahan yang mengarah pada budaya politik ini adalah masyarakat Suku Baduy Luar. Masyarakat Suku Baduy Luar dalam hal kognitifnya nol yakni segi pendidikan yang mereka peroleh tidak ada namun dalam berpartisipasi dalam hal kenegaraan. Kemudian tipe atau bentuk budaya politik subyek parokial merupakan suatu tipe kebudayaan politik dimana sebagian masyarakat menolak

tuntunan eksklusif masyarakat kesukuan atau desa atau otoritas feodal dan mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus. Adapun contoh dari tipe ini misalnya untuk di negara Korea Utara yang noteben menganut sistem pemerintahan komunis. Dalam menjalankan pemerintahannya ia memberikan kesadaran penuh tentang pentingnya pembangunan kepada masyarakat akan tetapi semuanya itu tidak mempengaruhi kebijakan subjek yang dilakukan pemerintahan sama halnya yang dimiliki oleh masyarakat Suku Baduy Dalam, dalam tingkat kognitifnya bersifat nol lalu dalam tingkat partisipasi masih pasif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari deskripsi latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana budaya politik masyarakat kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020?
- b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui budaya politik masyarakat kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020

2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kondisi bagaimana bentuk budaya dan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 menjadi referensi terhadap penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan pemerintah untuk menyusun kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan politik agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas perilaku dalam memilih di Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Budaya Politik

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, mekanisme penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Budaya politik masyarakat dalam perilaku memilih memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan public untuk masyarakat seluruhnya. Dengan demikian, budaya politik masyarakat berkaitan

dengan penjabaran nilai-nilai bersama yang tercermin dalam pola-pola sikap dan perilaku masyarakat dengan norma-norma politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Budaya politik dapat juga dikatakan suatu sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun setiap unsur masyarakat berbeda budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Sehingga masyarakat memiliki ciri khas sikap dan perilaku kolektifnya. Oleh sebab itu, sistem politik yang ada di negara Timur Tengah berbeda dengan sistem politik yang ada di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Benedict R. O. G. Anderson, cenderung terbagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa. mengklasifikasikan budaya politik kedalam tiga klasifikasi sebagai berikut;

1. Budaya politik parokial, adalah budaya politik dengan tingkatan partisipasi politik dari masyarakat amat rendah, karena aspek kognitif (seperti kualitas pendidikan masyarakat relatif buruk atau rendah). Tipe budaya politik ini ruang lingkupnya kecil dan sempit. Minimnya pemisahan atau diferensiasi maka dalam budaya politik ini tidak terdapat peranan khusus dan independen.
2. Budaya politik kaula, yaitu budaya politik yang berkembang dalam masyarakat cenderung berkemajuan, secara sosial dan ekonomi, namun masih pasif. Dalam tipe ini sudah ada ketertarikan dan keinsyafan pada sistem politik dari masyarakat. Namun terbatas pada aspek outputnya saja. Pada aspek inputnya masyarakat masih bersifat pasif, masyarakat

beranggapan bahwa mereka dalam posisi lemah dalam mempengaruhi sistem politik. Sikap masyarakat ini bersifat patuh dan loyal terhadap output dari sistem.

3. Budaya politik partisipan, adalah budaya politik masyarakat dengan ditandai keinsyafan politik amat tinggi.

1.5.2 Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih dalam pemilu juga dianalisis oleh Schumpeter (1966). Menurut dia pemilih mendapat informasi politik dalam jumlah besar atau (overload) dan beragam. Seringkali informasi yang diperoleh berasal dari berbagai macam sumber yang sangat mungkin bersifat kontradiktif. “Di tengah-tengah informasi yang melimpah ini, pemilih dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit untuk memilah-milah informasi. ” Sejalan dengan itu, Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa perilaku pemilih yaitu :

“Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih dalam suatu pemilihan umum, bila voters atau pemilih memutuskan untuk memilih maka akan memilih atau mendukung kandidat tertentu. Menilai perilaku memilih ialah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. ”

Menurut Affan Gaffar (1992. Hlm. 4-9), “Dalam menganalisis voting behavior dan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan

sebagai alasan oleh para pemilih dan mejatuhkan pilihannya, dikenal dua macam pendekatan, yaitu Mazhab Columbia yang menggunakan pendekatan sosiologis dan Mazhab Michigan yang dikenal dengan pendekatan psikologis”.¹⁰Selain itu terdapat pula pendekatan rasional choice yang melihat perilaku seseorang melalui kalkulasi untung rugi yang didapatkan oleh orang tersebut.

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini disebut juga dengan Mazhab Columbia. Cikal bakalnya berasal dari Eropa, model ini kemudian dikembangkan oleh para sosiolog Amerika Serikat yang mempunyai latar belakang Eropa. Menurut mazhab ini, pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kegiatan formal dan informal lainnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan pilihan-pilihan politik. Pendekatan ini pada dasarnya menekankan peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang, pendekatan ini menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial itu mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk perilaku pemilih.¹¹

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologis (terutama konsep sosialisasi dan sikap) untuk menjelaskan perilaku pemilih seseorang. Aliran yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam menganalisis voting behavior ini menyatakan bahwa

¹⁰Affan Gaffar. 1996. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta : Grafindo. Hal. 67-68.

¹¹ *Ibid*,.hlm. 34.

preferensi politik termasuk preferensi pemberian suara di kotak pemilihan seseorang merupakan produk dari karakteristik sosial ekonomi terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk melakukan analisis tentang suatu hubungan atau pengaruh, yaitu antara lain pendidikan, pekerjaan, pendapatan, atau kekayaan.

Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal, seperti organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok kecil lainnya akan sangat berguna bagi penjelasan perilaku pemilih seseorang. Pengelompokan ini memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang, yang nantinya sebagai dasar atau preferensi dalam menentukan pilihan politiknya.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis merupakan fenomena Amerika Serikat karena dikembangkan sepenuhnya di Amerika Serikat melalui Survey Research Center di Universitas Michigan. Munculnya pendekatan ini merupakan reaksi atas ketidakpuasan beberapa ilmuwan politik terhadap pendekatan sosiologis, beberapa ilmuwan yang menganut pendekatan psikologis ini menganggap pendekatan sosiologis secara metodologis sulit dilaksanakan, terutama dalam aspek pengukurannya. Pendekatan psikologis mensyaratkan adanya kecerdasan dan rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya.

Menurut pendekatan sosial psikologis, ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Tiga faktor tersebut adalah identifikasi partai, orientasi isu atau tema dan orientasi kandidat. Identifikasi partai yang dimaksud disini adalah bukan sekedar partai apa yang dipilih tetapi juga tingkat identifikasi individu terhadap partai tersebut (misalnya lemah hingga kuat). Menurut Philip Converse yang dikutip oleh Affan Gaffar (1992. Hlm. 10), mengartikan 'Identifikasi partai sebagai keyakinan yang diperoleh dari orang tua di masa muda dan dalam banyak kasus, keyakinan tersebut tetap membekas sepanjang hidup, walaupun semakin kuat atau memudar selama masa dewasa'. Lalu yang dimaksud dengan orientasi isu dengan orientasi isu atau tema adalah tema atau isu-isu apa saja yang diangkat oleh partai tersebut. Sedangkan, yang dimaksud orientasi.

c. Pendekatan Rasional

Dua pendekatan terdahulu menempatkan pemilih pada waktu dan ruang yang baik secara implisit maupun eksplisit. Ada faktor situasional yang memengaruhi perilaku pemilih. Faktor situasional ini bisa berupa isu-isu politik pada kandidat yang dicalonkan. Isu-isu politik ini menjadi bahan pertimbangan yang penting dimana para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaian terhadap isu-isu politik. Artinya pemilih pemula dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.

Pendekatan rasional membawa kita pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap visi, misi dan program kerja partai dan kandidat. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, dan tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri melainkan untuk kepentingan umum, menurut pikiran dan pertimbangan yang logis.

1.5.3 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu kegiatan politik yang merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5 tahun mendatang. Melalui pilkada terjadi pergantian pemegang kekuasaan secara teratur, damai dan berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurut Zuhro, dkk (2009:48) mengatakan bahwa Pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil kota

menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 pasal 1 yang berbunyi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

1.5.4 Teori Partisipasi Politik

Miriam Budiarto, menjelaskan bahwa, Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *directactionnya*, dan sebagainya.¹²

Hangtington dan Joan Nelson membagi Partisipasi Politik dalam beberapa bentuk seperti:

1. Aktivitas individu dalam kegiatan pemilihan umum.
2. Melakukan lobi politik atau pembicaraan politik dengan politikus atau pejabat pemerintah atau anggota parlemen,
3. Aktif dalam kegiatan organisasi sosial atau organisasi sayap partai politik,

¹²Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 127-128.

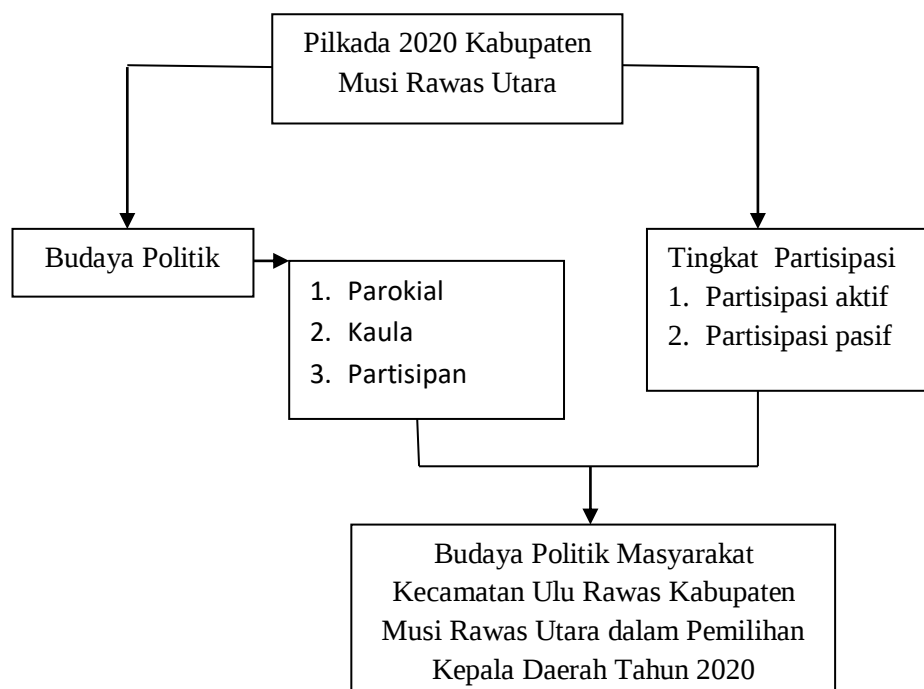
4. Berusaha membangun jaringan politik, dan
5. Melakukan tindakan kekerasan (*violence*) dalam bentuk huru-hura, terror, kudeta atau pemberontakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang dalam memilih adalah:

1. Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran ini mencakup pengetahuan, minat dan politik tempat tinggal.
2. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat di pengaruhi atau tidak.

1.6 Kerangka Pikir

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan penelitian, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati serta mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana penulis memperhatikan bahwa metode ini prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari narasumber.

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang berkaitan dengan tema secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan mengungkapkan keadaan sebenarnya untuk dapat mendapatkan data-data dari obyek yang diteliti. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

1.7.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka fokus penelitian adalah Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

1.7.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, yang dimana sumber data dalam penelitian ini berupa responden yaitu orang yang menjawab dalam melakukan penelitian, baik pertanyaan secara tertulis maupun lisan.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik informan ialah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Peneliti menggunakan metode penentuan informan *snowball sampling*, teknik penelitian ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka

peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua sebelumnya.¹³

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Sugiono: “Wawancara mendalam adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi.”¹⁴Wawancara dilakukan dengan kerangka pertanyaan tetap, penyajiannya tidak terikat dan tidak terstruktur oleh kerangka yang telah disiapkan. Artinya peneliti dapat memperdalam suatu informasi spesifik yang muncul dari informan tetapi tidak muncul dalam pedoman wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian atau peristiwa yang sudah berlalu yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya-karya nomenal dari seseorang.¹⁵Adapun dokumen-dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian, seperti laporan-laporan, foto-foto serta rekaman suara masing-masing informan yang telah ditentukan. Alat pengumpulan data dalam penelitian yaitu, pedoman wawancara, catatan lapangan, *handphone* (sebagai perekam suara, video, dan kamera), pena dan kertas.

¹³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Edisi 1 Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 85-96.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Cet. 22 Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 235.

¹⁵*Ibid*, hlm. 240.

1.7.7 Teknik Analisi Data

Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan. Yaitu:

a. Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi.

b. Penyajian Data

Penyajian diartikan menampilkan atau memaparkan data (informasi) yang diperoleh dalam proses pengumpulan data.

c. Penarikan Kesimpulan

Analisis pada tahap ini dilakukan setelah semua data di anggap cukup. Penulis mulai melihat hubungan-hubungan antara tema atau fenomena secara kontekstualisasi antara tujuan dan target penulisan dengan berbagai macam temuan nyata atau riil yang ada dilapangan.

1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga penelitian, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian dimana triangulasi ini dibutuhkan karena setiap teknik memiliki kelebihan maupun kelemahan tersendiri. Dengan demikian , triangulasi memungkinkan tangkapan realitas menjadi lebih valid.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara

Keinginan masyarakat Rupit Rawas waktu itu Kewedanan Rawas untuk memisahkan diri dari Kabupaten Musi Rawas sudah dimuali sejak tahun 1960. Pada tanggal 5 Agustus 1967 panitia besar persiapan Kabupaten Musi Rawas di Muara Rupit memberikan surat mandate kepada panitia besar Kabupaten Rawas konsulat Palembang untuk mengadakan rapat persiapan pembentukan Kabupaten Rawas. Berdasarkan surat mandate tersebut diadakan rapat pada tanggal 27 Agustus 1967 dimarkas daerah legion veteran RI Sumatera Selatan. Rapat tersebut dihadiri oleh masyarakat Rawas yang berada di Kota Palembang beserta pengurus dan anggota IPPM-MURA Palembang. Tugas dari panitia besar persiapan Kabupaten Rawas Konsulat Palembang yaitu, (1) menampung tuntutan rakyat Rawas yang menuntut kewedanan Rawas dijadikan Kabupaten Rawas; (2) mengolah dan merumuskan tuntutan rakyat Rawas tersebut; dan (3) mengajukan tuntutan rakyat Rawas tersebut pada pihak yang berwenang. Keinginan tersebut banyak menemui hambatan dan kendala, tetapi generasi penerus tidak tinggal diam, pada tahun 2004 dibentuklah Presidium Persiapan Kabupaten Musi Rawas Utara (PPK MURATARA). PPK MURATARA tersebut beberapa kali disempurnakan komposisi pengurusnya.³²

Pada bulan april 2005 lebih kurang 3000 masyarakat dari 7 kecamatan diwilayah Muratara menyampaikan aspirasinya ke DPRD dan Pemkan Musi Rawas. Masyarakat menuntut peme²⁵ segera diwujudkan. Masyarakat diterima

oleh ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Drs. HA. Karim AR, Bupati Musi Rawas Ir. Ibnu Amin, M.Sc, sekretaris daerah Kabupaten Musi Rawas Drs. Syarif Hidayat, MM dan disepakati bupati dan ketua DPRD menugaskan sekda sebagai ketua tim dengan tugas memperbaharui semua administrasi dan kelengkapan pemekaran Kabupaten Musi Rawas. Dalam tempo 15 hari hasil kerja tim telah disampaikan kepada DPRD kabupaten Musi Rawas dan dibentuk pansus pembahasan pemekaran Kabupaten Musi Rawas.¹⁶

Tahun 2007 masyarakat diwilayah Musi Rawas Utara kembali melakukan demonstrasi dengan jumlah yang lebih besar lagi lebih kurang sekitar 7000 massa mendatangi kantor bupati segera menyetujui pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada saat demonstrasi tersebut massa terpancing melempari kaca gedung DPRD karena merasa dilecehkan oleh orasi Bupati Musi Rawas. Karena situasi semakin memanas bupati diamankan kedalam gedung DPRD. Selanjutnya ribuan masyarakat tersebut bergerak maju kearah perbatasan Muratara dengan Kbaupaten Musi Rawas didekat jembatan air dulu. Masyarakat menutup jalan lintas sumatera dan tetap menuntut pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada saat itu disepakati dalam surat perjanjian yang ditulis oleh Ir. Arjuna Japri, ditandatangani oleh wakil.¹⁷

Pemkab Musi Rawas, unsure Muspida, Ketua DPRD dan Ketua Presidium, sepakat membuka jalan lintas dan bupati Musi Rawas menandatangani

¹⁶Dokumen BAPPEDA Musi Rawas Utara, Pada Kesempatan Pengambilan Data Pra Riset Kantor Bupati Musi Rawas Utara Oleh Kabag Humas, Pada 30 Januari 2019
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013, Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara

persetujuan Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara. Usaha tersebut belum juga berjalan mulus, maka presidium menemui Gubernur, Kapolda dan Pangdam. Sementara tokoh-tokoh Muratara mendatangi Bupati Musi Rawas di rumah dinas (Pendopo Kabupaten) untuk menandatangani persetujuan pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara. Terbentuknya Kbaupaten Musi Rawas Utara terus diperjuangkan melalui berbagai cara dan pada puncaknya terjadilah bentrokan.³⁴

Rentetan waktu yang begitu panjang untuk menunggu dan berharap, setidaknya dari lahirnya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor :12/KPT/DPDRD/2005 bulan September 2005 tentang persetujuan usul pemekaran kabupaten Kewedanan Rawas, mengakibatkan warga masyarakat Musi Rawas Utara lelah menunggu dan mananti, pertanyaan selalu mengema, kapan kabupaten DOB Musi Rawas Utara disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR RI. Ditengah-tengah ketidakpastian, terlambat dan tersendatnya komunikasi publik pemerintah pusat dan daerah, kepada warga masyarakat tentang kepastian waktu, kapan RUU DOB Kabupaten Musi Rawas Utara disetujui dan disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah RI.

Hari senin tanggal 23 april 2013, terjadilah pemblokiran jalan lintas Sumatera (jalinsum) dengan cara membakar ban ban bekas sebagai bentuk tuntutan, protes warga masyarakat Musi Rawas Utara, agar kabupaten Musi Rawas Utara segera lahir dan disahkan, dalam waktu singkat hari itu juga, aksi menutup total akses lalu lintas jalan Negara, yaitu jalur yang menghubungkan Jambi, Palembang, dan Bengkulu. Bahkan keinginan Polisi agar warga membuka

sebagian jalan yang diblokir justru dibalas dengan lemparan batu, secara missal dan menyatu. Menjelas sore, aksi warga masih berlangsung. Mereka menyatakan baru akan membuka blockade bila Gubernur dan Menteri Dalam Negeri RI datang menemui warga.

Aksi tetap berlangsung hingga malam hari. Pukul 20.00 WIB, wakil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang datang membujuk warga untuk membuka blokir jalan, juga tidak digubris gambaran nyata saat itu warga yang sudah larut dalam semangat, emosi dalam satu tuntutan, kabupaten harus mekar dan lahir. Sekitar pukul 21.00 WIB, senin malam Kapolres Musi Rawas kembali meminta massa membubarkan diri. Namun ribuan warga justru merapat dalam posisiberhadap-hadapan. Letusan yang diduga berasal dari senjata api terdengar.

Aksi sempat mereda, tapi justru satu jam kemudian, massa dengan beringas kembali melempari petugas. Bentrokan tak dapat dihindari, kemarahan warga sudah tidak terkendali lagi, setelah mereka mengetahui ada empat orang meninggal dalam bentrokan itu diyakini karena peluru pihak aparat yang berusaha membubarkan massa. Massa yang marah kemudian merusak dan membakar Polsek Muara Rupit. Dua mobil, satu sepeda motor dan sejumlah rumah diasrama polisi ikut mereka hancurkan. Mereka juga membakar dua mobil patrol polisi dan markas Polsek Rupit. Dalam kejadian itu puluhan. demonstrasi mengalami luka-luka, 4 orang meninggal dunia dan 6 polisi mengalami cedera. Empat korban yang tewas akibat penembakan dalam bentrokan antara demonstiran dan pihak aparat tersebut, dimakamkan keesokanhari selasa siang 30 April 2013.

Sementara itu, belasan korban luka-luka lainnya dirawat di rumah sakit terdekat dilubuk linggau dan rumah sakit, puskesmas terdekat. Para korban yang meninggal dan luka-luka adalah para pejuang pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara dan warga masyarakat Musi Rawas Utara, akan mematrikan nama-nama mereka sebagai pejuang dalam perjalanan sejarah berdirinya, mengisi pembangunan kabupaten DOB Musi Rawas Utara semangat dan pengorbanan para pejuang berdirinya Kabupaten Musi Rawas Utara, dimotori oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh Presidium pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara, parapejuang baik yang berada di jajaran legislative, eksekutif dipemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara dan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.¹⁸

Setelah melalui perjalanan panjang proses pembentukan Kabupaten Muratara yang dirintis sejak tahun 1960-an akhirnya terbentuk dan lahir Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) Daerah Otonom Baru (DOB), tepatnya pada hari selasa, tanggal 11 juni 2013 Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten yang ke-15 dari 19 DOB disahkan oleh DPRD. 2009-2014. Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Kabupaten/ Kota ke-17 di Sumatera Selatan.

2.2 Geografis Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu Kabupaten diujung barat wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini adalah daerah otonomi baru berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2013 dan merupakan hasil pemekaran dari kabupaten musirawas. Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas Utara

¹⁸Dokumen BAPPEDA Musi Rawas Utara, Pada Kesempatan Pengambilan Data Pra Riset Kantor Bupati Musi Rawas Utara Oleh Kabag Humas, Pada 30 Januari 2019

terletak antara 102°4'0" BT-103°22'13" BT dan 2°19'15" LS-3°30'30" LS. Kabupaten Musi Rawas Utara berbatasan langsung dengan provinsi Jambi dan provinsi Bengkulu. Berikut batas wilayah administrasi dari kabupaten Musi Rawas Utara :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Perdamaian, Desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut, dan Desa Mesip, Desa Napal Melintang Kecamatan Limun kabupaten sarolangun, provinsi jambi.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sako Suban, Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batangharileko dan Desa Ulak Embacang, Desa Air Balui Kecamatan Sanga Kabupaten Musi banyuasin, provinsi sumatera selatan.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukakarya, Desa Kosgoro, Desa Suka Merindu Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu terawas, Desa Madang Kecamatan Sumber Harta, Desa Rejo Sari, Desa Tegal Sari, Desa.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ulu sebelas Kecamatan Pinang Belapis dan Desa Tik Serong Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Musi Rawas Utara beribukota di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit dengan luas wilayah mencapai 6.008,55 km². Secara administratif, Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi tujuh kecamatan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Ulu Rawas yang mencapai hampir seperempat luas wilayah kabupaten Musi Rawas Utara. Kecamatan muara rupit merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 6,41% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berikut ini adalah Tabel perbandingan jarak tempuh per-kecamatan menuju Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara:

Tabel 2.1
Perbandingan Jarak Tempuh Per-Kecamatan menuju Kabupaten
Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	KECAMATAN	KAB.MURA	KAB. MURATARA
1	Rawas Ulu	154,4 kmkm	31,1 km
2	Ulu Rawas	154,4 km	31,1 km
3	Rupit	125,0 km	5,5 km
4	Karang Jaya	116,4 km	32,1 km
5	Rawas Ilir	187,1 km	63,7 km
6	Karang Dapo	144,7 km	21,4 km
7	Nibung	75,3 km	36,0 km

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jarak tempuh perkecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara menuju Kabupaten Musi Rawas yang menjadi kabupaten induk terhitung cukup jauh, dimana pelayanan publik seperti pembuatan surat dan lain-lain. Secara administratif, lebih rinci Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 89 desa. Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rupit merupakan dua kecamatan dengan jumlah desa yang terbanyak, yaitu masing-masing 17 desa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu Ulu Rawas, yaitu tujuh desa. Pembagian administrasi dan ibukota serta jumlah desa perkecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Adapun distribusi kependudukan berdasarkan komposisi dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten
Musi Rawas Utara

Kecamatan	Kelurahan	Banyak Kelurahan Desa			Nama Kelurahan/ Desa
		Kelurahan	Desa	Jumlah	
Karang Dapo	Karang Dapo	1	8	9	Karang Dapo, Karang Dapo1, Biara Lama, Biara Baru, Bina Karya, Setia Marga, Aringin, Rantau Kadam, Kertasari
Karang Jaya	Karang Jaya	1	14	15	Bukit Ulu, Sukaraja, Lubuk Kumbang, Tanjung Agung, Rantau Telang, Muara Batang Empu, Sukamenang, Terusan, Karangjaya, Muara Tiku, Embacang Lama, Embacang Baru, Rantau Jaya, Bukit Langkap, Embacang Baru Hilir
Nibung	Karang Makmur	1	10	11	Jadi Mulya, Kerani Jaya, Sumber Makmur, Mulya Jaya, Kelumpan g Jaya, Srijaya Makmur, Karya

Kecamatan	Kelurahan	Banyak Kelurahan Desa			Nama Kelurahan/ Desa
		Kelurahan	Desa	Jumlah	
					Makmur, Tebing Tinggi, Bumi Makmur, Sumber Sari, Jadi Mulya 1
Rawas Ilir	Bingin Teluk	1	12	13	Beringin Makmur I, Bingin Teluk, Mandi Angin, Beringin Sakti, Beringin Makmur II, Tanjung Raja, Belani, Batu kucing, Pauh, Pauh I, Air Bening, Ketapat Bening, Mekar Sari
Rawas Ulu	Pasar Surulangu n	1	16	17	Pangkalan, Teladas, Kerta Dewa, Pulau Lebar, Sungai Baung, Surulangun, Sungai Jauh, Sungai Kijang, Lesung Batu, Lubuk Kemang, Remban, Lubuk Mas, Sungai Lanang, Simpang Nibung Rawas, Sukomoro

Kecamatan	Kelurahan	Banyak Kelurahan Desa			Nama Kelurahan/ Desa
		Kelurahan	Desa	Jumlah	
Rupit	Muara Rupit	1	16	17	Tanjung Beringin, Noman, Batu Gajah, Maur Baru, Maur Lama, Bingin Rupit, Muara Rupit, Lubuk Rumbai, Lawang Agung, Sungai Jernih, Karang Waru, Karang Anyar, Noman Baru, Batu Gajah Baru, Beringin Jaya, Lubuk Rumbai Baru
Ulu Rawas	Muara Kulam	1	7	8	Kuto Tanjung, Napal Licin, Sosokan, Muara Kulam, Muara Kuis, Pulau Kidak, Jangkat

2.3. Topografis Kabupaten Musi Rawas Utara

Hasil analisis peta Topografi Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa topografi Kabupaten Musi Rawas Utara cukup bervariasi, terdiri dari pegunungan, perbukitan dan dataran. Hampir 30% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara disebelah barat termasuk deretan Pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari ujung Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai ujung Provinsi Lampung. Pegunungan Bukit Barisan melintasi sebagian Kecamatan Ulu

Rawas dan Kecamatan Karang Jaya di Kabupaten Musi Rawas Utara.

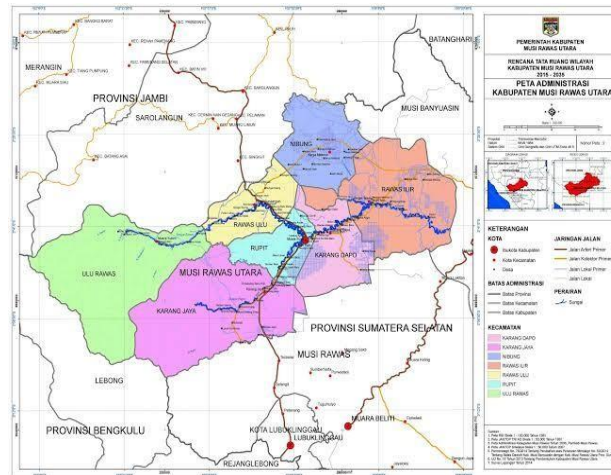
Bagian tengah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah dataran dengan kemiringan lereng <25%. Setidaknya ada dua sungai besar dan beberapa anak sungai yang mengalir di daerah ini sehingga banyak pula menghasilkan bentukan-bentukan fluvial. Daerah Dataran ini setidaknya mencapai hampir 50% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian tengah. Topografi wilayah bagian timur Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan perbukitan dengan kemiringan lereng berkisar antara 25-40% dan elevasi antara 75-125 mdpl. Sebagian besar daerah di Kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir memiliki topografi demikian.

2.4 Kondisi Peta Kabupaten Musi Rawas Utara

Sengketa denah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan kabupaten yang baru pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Musi Rawas (Lubuklinggau). Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu.⁴¹ Ibukota Musi Rawas Utara terdapat di Daerah Rupit, dan terdiri dari 7 kecamatan yaitu Kecamatan Rawas Ulu, Ulu Rawas, Rawas Ilir, Karang Jaya, Karang Dapo, Rupit, Nibung. Dapat dilihat dalam gambar peta sebagai berikut :

Gambar 2.1

Peta kabupaten Musi rawas Utara



2.5 Kondisi Pendidikan dan Budaya

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia karena merupakan instrumen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manusia, dalam hal ini menjadi salah satu terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan adanya peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan. Upaya peningkatan partisipasi bersekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan tersedianya sarana fisik dan tenaga pendidik.

Kabupaten Musi Rawas Utara dapat meningkatkan capaian indeks pendidikan yang pada tahun 2016 mencapai 85.17% meningkat pada tahun 2017 sebesar 85.98% atau meningkat sebesar 0.81%. Berikut ini adalah table perbandingan indeks pendidikan Prov. Sumatera Selatan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara :

Tabel 2.3
Perbandingan Indeks Pendidikan Kabupaten Musi
Rawas (Induk) dan Kabupaten Musi Rawas Utara
(DOB)

Tahun	Prov. Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara
2013	0.57	0,67
2014	0.58	0,68
2015	0.59	0,68
2016	0.60	0,68
2017	0.60	0.68

Dari table diatas dapat diketahui bahwa indeks pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Utara masih diatas capaian dari Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai kabupaten DOB sudah mengalami pertumbuhan di bidang pendidikan. Meski demikian ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi daerah untuk mencapai keberhasilan pencapaian indeks pendidikan¹⁹, yaitu::

- a. Kurangnya daya tampung ditingkat PAUD sehingga masih banyak siswa yang tidak tertampung
- b. Pencapaian indikator terkait peserta didik SMA tidak bisa dikontrol lagi, dikarenakan beralihnya kewenangan daerah terkait pengelolaan urusan pendidikan SMA yang menjadi kewenangan provinsi.
- c. Masih kurangnya kualitas pendidik, karena masih banyak yang belum memenuhi syarat minimal seorang pengajar (D-4/S-1).

¹⁹ Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada kesempatan wawancara di kantor bupati Musi Rawas Utara tanggal 26 November 2019

Peningkatan pendidikan ini menjadi salah satu bentuk kesejahteraan masyarakat dimana kebutuhan warga daerah terpenuhi dalam bentuk pendidikan, termasuk kedalam pra-sarana yang disediakan pemerintah. Meski adanya masalah dalam menjadikan pendidikan memiliki indeks diatas rata-rata tentu saja pemerintah sudah memiliki strategi atau upaya pemecahan masalah bagi masalah yang ada di Kabupaten Musi Rawas.

Adanya hambatan atau masalah dalam bidang pendidikan ini tidak memperburuk perbandingan indeks pendidikan jika di bandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan seperti tabel 8 diatas. Tentu saja hal ini menjadi keberhasilan bagi Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Daerah Otonom Baru, dimana keberhasilan ini dikarenakan adanya integrasi antara program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

2.6 Kondisi Kesehatan .

Kesehatan merupakan salah satu program kesejahteraan masyarakat dimana kesehatan merupakan salah satu terpenuhinya pelayanan publik daerah. Indeks kesehatan masyarakat kabupaten Musi Rawas Utara mengalami pertumbuhan yang positif mulai tahun 2014. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan beberapa penurunan angka kematian ibu hamil, kematian bayi, hingga jumlah balita penderita gizi buruk. Pada tahun 2017, kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan indeks kesehatan sebesar 71.11%, capaian ini meningkat dari tahun 2016 sebesar 70.91% atau meningkat sebesar 0.2%. Hal ini dikarenakan ada beberapa pencapaian antara lain : jumlah kasus kematian ibu di kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2017 sebanyak 5 kasus

atau sebanyak 1,54% per 1.000 kelahiran hidup, jumlah kasus kematian bayi dikabupaten Musi Rawas Utara tahun 2017 sebanyak 14 kasus atau sebesar 4,31 per 1.000 kelahiran hidup. Dan jumlah balita BGM dikabupaten Musi Rawas Utara tahun 2017 sebanyak 189 orang per 15.160 balita ditimbang atau sebanyak 1,2 persatuan balita.

Tabel 2.4
Perbandingan Indeks Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan
Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	Prov. Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara
1	75.62	69.58
2	75.90	69.85

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indeks kesehatan di Kabupaten Musi Rawas Utara masih dibawah capaian dari Provinsi Sumatera Selatan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki indeks kesehatan 69.58 kemudian pada tahun 2015 hingga tahun terakhir indeks kesehatan mengalami kenaikan meskipun belum dapat mencapai indeks kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Diketahui bahwa indeks kesehatan ini dalam mencapai keberhasilan dikarenakan adanya faktor- faktor yang meempengaruhinya, yaitu:

- a. Mengaktifkan tim AMP/ Analisis Maternal Perinatal dengan keputusan walikota
- b. Meningkatkan upaya preventif dan promotif dengan cara pembinaan/ penyuluhan calon pengantin kerjasama dengan kantor Kmentrian Agama,

mengintensifikan kelas ibu hamil di Pukesmas, maupun kelurahan dan meningkatkan peran kader dalam mendampingi bumil risti. Pembiayaan jampersal bagi ibu hamil risti.

Kesejahteraan masyarakat kabupaten Musi Rawas Utara dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi relatif stabil dengan kabupaten induk dan dari perbandingan dengan provinsi sumatera selatan juga lebih tinggi. Tingginya indeks pendidikan menunjukkan bahwa pemekaran kabupaten Musi Rawas Utara hampir sampai pada tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat. Dari sisi kesehatan kabupaten Musi Rawas Utara juga mendapatkan indeks kesehatan yang tinggi, akan tetapi ada beberapa hambatan yang menjadi permasalahan di bidang kesehatan yaitu masih belum optimalnya kualitas layanan kesehatan, masih terbatasnya sarana prasarana atau fasilitas kesehatan dan masih banyak warga tidak mampu yang belum tercover pelayanan kesehatan.

Pemekaran Daerah memberikan dampak positif dan mempermudah segala urusannya pembentukan kebijakan oleh pemerintah pasti juga didasarkan pada adanya dampak positif yang akan dirasakan baik dari masyarakat ataupun pemerintah itu sendiri, termasuk mengenai kebijakan pemekaran daerah. Pemekaran daerah juga dapat membantu kontrol pemerintah pusat terhadap keadaan suatu daerah, karena melalui pemekaran wilayah berarti adanya perluasan dan pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dari data wawancara dan dokumen yang peneliti dapatkan tentang pengaruh pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat, tidak hanya pengaruh

positif yang ditimbulkan karena adanya suatu pemekaran wilayah, namun pada kenyataannya ada pula dampak negatif dari pemekaran wilayah terlepas dari tujuannya demi kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah dapat memicu keinginan untuk melepaskan diri, sehingga dapat mengancam keutuhan serta stabilitas keamanan daerah maupun wilayah secara keseluruhan bagi suatu Negara. Pemekaran wilayah juga akan berdampak pada keadaan pemerintah pusat yang terabaikan, karena pemerintah daerah akan sibuk bersaing dalam upaya memajukan serta pengembangan potensi daerah masing-masing. Kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara setelah dilakukan perbandingan mengalami pengaruh yaang positif meski belum sepenuhnya menyamai kabupaten induk akan tetapi Kabupaten Musi Rawas Utara telah berhasil dalam menjalankan program kesejahteraan yang menjadi tujuan utama terjadinya pemekaran daerah.

2.7 Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara

2.7.1 Visi

Mewujudkan CITRA (Cepat, Inovatif, Transparan, Responsif, Akuntabel) Musi Rawas Utara Berhidayah.

2.7.2 Misi

1. Peningkatan Daya Saing Melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Kearifan Lokal.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam Manusia Yang Berakhlak, Toleran, dan Harmoni.

3. Peningkatan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Cerdas, Inovatif,
Transparan, Responsif, dan Akuntabel.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan yang menggelar pemilukada serentak dalam pemilihan bupati/wakil bupati dan gubernur/wakil gubernur pada 7 desember 2020 lalu. Penelitian ini mengkaji mengenai budaya politik masyarakat khususnya di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Pemilukada di Kabupaten Musi Rawas Utara di ikuti oleh 3 Pasangan Calon (Paslon). Heriyanto komisioner KPU devisi data menjelaskan bahwa Hasil pleno hari ini untuk daftar pemilih tetap berjumlah 143382, Untuk pemilih laki laki 72140 dan pemilih perempuan 71242.

Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Pemaparan hasil penelitian dirangkum dalam dua tema besar. Pertama, mengenai bagaimana budaya politik masyarakat dalam Pemilukada di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Bagian pertama ini menjelaskan tentang budaya politik yang terdapat pada masyarakat dalam Pemilukada di Kecamatan Musi Rawas Utara tahun 2020.

Disamping itu juga diungkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya budaya politik yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilukada tahun 2020. Pada bagian kedua ini akan dipaparkan mengenai tingkat partisipasi memilih yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Ulu Rawas dalam Pemilukada tahun 2020.

Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat merupakan sebuah elemen yang penting dan sebagai pondasi praktek demokrasi perwakilan. Sebab dalam demokrasi perwakilan pemilu merupakan ajang kontestasi dalam memilih wakil rakyat yang seharusnya dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis. Pemilu merupakan sebuah tools (alat) untuk mengisi posisi dan jabatan publik melalui proses pemilihan oleh sekelompok orang (pemilih) yang diarahkan untuk mendukung berjalannya pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif. Terkait dengan ini peran masyarakat menjadi penting. Seperti yang dikemukakan Mirriam Budiardjo, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.

3.1 Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada didalam sistem tersebut. Budaya politik sebagai salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu, dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat,

serta harapan-harapannya. Berikut pernyataan dari Bapak Ahmad Staf KPU Kabupaten Musi Rawas Utara:

“Menurut saya budaya masyarakat Kecamatan Ulu Rawas yang kita ketahui secara didunia politik mereka mengikuti saja perkembangannya dan mereka juga mempunyai berbagai macam budaya bahasa yang memiliki masing-masing cara sosialisasi pada masyarakat lainnya”.²⁰

Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) adalah salah satu bentuk proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia. Begitupun dengan pilkada yang telah dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020, dimana masyarakat diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan pemimpin didaerahnya. Pada pilkada di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 antusias masyarakat untuk berpartisipasi cukup tinggi, khususnya masyarakat di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Hal demikian yang ditentukan peneliti selama proses penelitian berlangsung, dimana peneliti mewawancarai salah satu Staf KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal ini yaitu Bapak Kevin terkait partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2020.

“Tingkat kesadaran Politik khususnya Kabupaten Musi Rawas Utara itu alhamdulillah sudah mulai meningkat karena dilakukannya sosialisasi terbuka maupun dengan media sosial seperti watshapp, fb,ig, tiktok dan adanya koordinasi dari lembaga ke pemerintah daerah yang terkait di masing-masing Kecamatan”.²¹

Dari hasil wawancara dengan Staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat dikemukakan bahwa Masyarakat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara yang mempunyai budaya politik partisipan terbukti dalam ajang perhelatan

²⁰Hasil Wawancara dengan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara, Bapak Ahmad, 24 November 2022

²¹Hasil Wawancara dengan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara, Bapak Kevin, 24 November 2022

akbar pemilihan bupati/wakil bupati yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 07 Desember 2020.

3.1.1 Alasan Masyarakat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilukada 2020.

Tidak jauh dengan pernyataan Rahayu seorang masyarakat Kecamatan Ulu Rawas alasannya memilih Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 ia mengatakan:

“saya hanya selaku masyarakat biasa, tidak terlalu memahami atau memperhatikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Musi Rawas Utara tetapi saya memilih karena saya mempunyai hak untuk memilih pemimpin 5 tahun yang akan datang”.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Ulu Rawas maka dapat diketahui bahwa alasan sebagian besar masyarakat Ulu Rawas menggunakan hak pilihnya karena mereka menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Karena dengan mengikuti Pemilukada, berarti mereka turut serta membantu mengubah negeri ini menjadi lebih baik. Mereka juga menggunakan hak pilihnya untuk menyalurkan aspirasinya karena mereka menyadari sebagai Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam mengikuti pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Setelah dilakukan wawancara, ternyata sebagian besar dari masyarakat Kecamatan Ulu Rawas yang memilih salah satu calon bupati dan wakil bupati juga dikarenakan visi misi pasangan tersebut yaitu menciptakan Kabupaten Musi

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Rahayu Masyarakat Pemilih/Petani Kebun warga Desa Jangkat, 25 Januari 2023.

Rawas Utara Berhidayah , melalui misi mewujudkan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh, mewujudkan pelayanan prima sebagai wujud reformasi birokrasi, mewujudkan infrastruktur publik yang berkeadilan, mewujudkan tata kelola pertanian dan perkebunan yang berkeadilan, mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdaya saing, mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat, mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis, mewujudkan perekonomian yang kuat, mandiri dan berkeadilan.

3.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan fakta bahwa dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilukada Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020, memang terdapat banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat Ulu Rawas untuk memilih calon bupati dan wakil bupati. Faktor-faktor yang mempengaruhi mereka antara lain adalah faktor agama, pendidikan dan visi misi yang diusung oleh Paslon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada Kabupaten Musi Rawas Utara Meriah 2020.

a. Faktor pendidikan

Pendidikan adalah instrumen yang paling utama untuk meningkatkan kemampuan manusia dan untuk mencapai sasaran-sasaran di bidang sosial dan pembangunan ekonomi. Pendidikan memungkinkan individu atau masyarakat untuk membuat aneka pilihan, meluaskan kedudukan dan pendapat dalam pengambilan keputusan publik. Pada tingkatan makro, pendidikan berarti kekuatan dan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan tenaga

kerja yang produktif dan terampil. Pada tingkatan ini, pendidikan benar-benar dihubungkan dengan pendapatan yang lebih tinggi yang membangkitkan peluang, pengetahuan dan keberadaan dalam masyarakat yang dibutuhkan dapat memperoleh manfaatnya.

Pendidikan dapat diinterpretasikan sebagai kepentingan peningkatan kualitas fisik dan non fisik. Secara hipotik, hubungan ini akan menghasilkan pembahasan budaya, perilaku, baik perilaku kesehatan, kesegaran jasmani dan meningkatkan produktivitas. Pendidikan juga berkaitan dengan pendapatan individu, peningkatan pendidikan menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, yang mana kebanyakan masyarakat kecamatan ulu rawas dengan pendapatan yang cukup rendah dengan memanfaatkan hasil hutan seperti, mendulang emas, berkaret dan bertani. Faktor pendidikan yang tinggi dari calon bupati dan wakil bupati sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilukada Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 karena mereka beranggapan bahwa calon bupati dan wakil bupati yang memiliki pendidikan tinggi mampu mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan berarti memiliki pengetahuan yang luas dengan pengetahuannya itu, diharapkan dapat memimpin Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk lima tahun ke depan supaya lebih baik lagi terutama terhadap pembangunan infrastruktur jalan, pertanian dan perkebunan, sehingga dapat mendongkrak perekonomian

masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara.²³ Berikut pernyataan Puja seorang Mahasiswa Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara:

“ Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 kemarin saya memilih berdasarkan visi-misi karena menurut saya visi-misi itu dapat menentukan pilihan yang tepat untuk kemajuan dan perkembangan daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara dan juga seorang figur yang berpendidikan luas serta berinovatif ”.²⁴

Selain itu juga hampir sebagian besar masyarakat juga memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati karena kesamaan agama. Selain itu, sebagian besar dari mereka juga memilih karena kesamaan suku. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak faktor serta pertimbangan yang menyebabkan seseorang menjatuhkan pilihan politiknya pada Pemilukada bukan hanya berdasarkan pada agama dan suku semata. Tetapi ada faktor lain yaitu tingginya tingkat pendidikan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilukada di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam budaya politik terdapat orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Sehingga, dalam penelitian ini masyarakat Kecamatan Ulu Rawas telah diberi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara, yang ditujukan untuk menguji sifat partisipan dari budaya politik masyarakat Kecamatan Ulu Rawas dimana budaya politik partisipan memiliki karakteristik partisipan aktif yang tinggi baik terhadap objek-objek input maupun objek-objek output dari sistem politik.

²³Hasil Wawancara dengan Wiwin, Masyarakat Pemilih/Petani Kebun warga Desa Jangkat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara , 25 Januari 2023

²⁴Hasil Wawancara dengan Puja, Mahasiswi, 25 Januari 2023

3.1.3 Orientasi Budaya Politik Kognitif Pada Masyarakat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi dalam budaya politik partisipan berdasarkan orientasi kognitif yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti visi dan misi calon bupati dan wakil bupati yang sudah dipilih mereka, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lagu kebangsaan Negara.²⁵

Dari hasil penelitian lapangan terdapat fakta bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Ulu Rawas mengatakan bahwa visi dan misi yang dibawa oleh calon bupati dan wakil bupati berpengaruh terhadap pilihan politik mereka ketika Pemilu di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 dan sebagian kecil masyarakat Kecamatan Ulu Rawas yang menjawab bahwa visi dan misi yang dibawa oleh calon bupati dan wakil bupati tidak berpengaruh terhadap pilihan politik mereka. Namun ketika dilakukan wawancara secara mendalam ternyata sebagian besar dari mereka banyak yang tidak mengetahui secara detail isi dari visi dan misi yang dibawa oleh calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Rawas Utara yang sudah dipilihnya. Sedangkan masyarakat Kecamatan Ulu Rawas yang mengetahui secara detail isi dari visi dan misi yang dibawa oleh calon bupati dan wakil bupati hanya sebagian kecil masyarakat saja. Hal ini

²⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 16.

menunjukkan bahwa sosialisasi politik yang dilakukan oleh PPS Kecamatan Ulu Rawas serta KIP Kabupaten Musi Rawas Utara pada masyarakat Kecamatan Ulu Rawas dalam Pemilu di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 untuk memilih bupati dan wakil bupati dapat dikatakan sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Selain itu, terdapat alasan lain yang mempengaruhi mereka untuk memilih salah satu calon bupati dan wakil bupati yaitu adanya hibah atau hadiah berupa uang yang dibagi-bagikan oleh tim sukses yang ada di Kecamatan Ulu Rawas. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum masyarakat Kecamatan Ulu Rawas mempunyai budaya politik partisipan dimana mereka mempunyai pengetahuan tentang isi dari visi dan misi yang dibawa oleh Paslon bupati dan wakil bupati yang sudah mereka pilih. Masyarakat Ulu Rawas menjadi partisipan pada output sistem politik sebab mereka sudah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 yang lalu.

Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan politik atau aspek kognitif dari budaya politik masyarakat Kecamatan Ulu Rawas, maka dilakukan wawancara secara dalam kepada mereka mengenai pengetahuan tentang pengertian dari politik dan budaya politik. Berdasarkan hasil wawancara terdapat fakta bahwa sebagian kecil masyarakat Kecamatan Ulu Rawas yang mengerti apa itu pengertian politik. Selain itu, juga ditemukan fakta lain bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Ulu Rawas tidak mengetahui pengertian dari budaya politik sebab hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui pengertian budaya politik.

Hal ini disebabkan karena kurangnya kesempatan mereka dalam mengikuti diskusi-diskusi politik baik untuk ikut serta langsung dalam kegiatan politik maupun untuk melihat atau mendengarkan berita politik serta kurangnya pengetahuan mereka terhadap politik dan budaya politik, karena keseharian mereka sibuk dengan aktivitas rutin di kebun-kebun atau ladang-ladang untuk bercocok tanam.²⁶

Berdasarkan data yang diperoleh di sekretariat Kecamatan Ulu Rawas diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Ulu Rawas rendah karena sebagian besar dari mereka hanya lulusan sekolah dasar sebanyak 161 orang dan lulusan sekolah menengah pertama sebanyak 245 orang bahkan ada juga dari mereka yang tidak tamat sekolah dasar sebanyak 150 orang. Adapun masyarakat yang lulusan sekolah menengah atas sebanyak 81 orang dan lulusan perguruan tinggi hanya sebagian kecil saja yaitu sebanyak 56 orang. Hampir sebagian besar masyarakat di Kecamatan Ulu Rawas juga lebih mengutamakan pekerjaan mereka dibandingkan memikirkan hal yang berbau politik.

3.2 Partisipasi Budaya Memilih Masyarakat Kecamatan Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pada bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana partisipasi budaya atau perilaku memilih masyarakat Kecamatan Ulu Rawas yang dilihat dari Pendekatan rasional. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan fakta bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Ulu Rawas menyatakan bahwa memilih salah satu paslon bupati dan wakil bupati pada Pemilu di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun

²⁶Hasil Wawancara dengan Arief, Mahasiswa, 25 Januari 2023

2020 dikarenakan visi misi dan program-program unggulan yang ditawarkan oleh Paslon bupati dan wakil bupati, program-programnya dinilai menarik dan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara. Berikut pernyataan dari Bapak Ahmad Staf KPU Kabupaten Musi Rawas Utara:

“Menurut saya kebanyakan masyarakat itu memilih karena ketertarikan mereka terhadap seorang figur yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati serta terdapatnya visi-misi yang menyakinkan mereka untuk memilih pemimpin yang mampu menepati janji-janji dalam membangun daerah yang maju dan berkembang”.²⁷

Dari wawancara peneliti diatas dengan bapak Ahmad bahwa Masyarakat memilih karena visi dan misi atau program kerja yang ditawarkan oleh Paslon bupati dan wakil bupati menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya Kecamatan Ulu Rawas. Dalam hal ini masyarakat berharap visi dan misi tersebut bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Kecamatan Ulu Rawas khususnya dan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara pada umumnya supaya lebih sejahtera, lebih mandiri, dan lebih makmur. Tetapi, setelah dilakukan wawancara secara mendalam masyarakat Kecamatan Ulu Rawas, mengetahui isi dari visi dan misi dari calon bupati dan wakil yang sudah dipilih. Namun tidak hafal seluruhnya, sebab mereka hanya hafal beberapa poin yang menurut mereka penting dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Ulu Rawas.

²⁷ Hasil Wawancara dengan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara, Bapak Ahmad, 23 November 2022

Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan PPS Kecamatan Ulu Rawas dan KIP Kabupaten Musi Rawas Utara belum sepenuhnya berhasil, sehingga masih terdapat banyak masyarakat yang tidak tahu isi dari visi dan misi yang diusung oleh calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020. Meski demikian, masyarakat berharap agar visi dan misi Paslon bupati dan wakil bupati terpilih agar bisa diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ulu Rawas terutama dapat mendongkrak pada sector pertanian dan perkebunan di wilayah itu. Ditemukan juga fakta lain bahwa ada sebagian kecil masyarakat Kecamatan Ulu Rawas yang menyatakan bahwa mereka memilih bukan dikarenakan visi misi dan program- program yang ditawarkan oleh Paslon bupati dan wakil bupati yang maju dalam Pemilukada di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020. Dalam hal ini masyarakat memilih karena kesadaran dari diri sendiri bahwa sudah waktunya memilih maka mereka menggunakan hak pilihnya dan mereka memilih karena kemantapan hati mereka untuk memilih salah satu Paslon bupati dan wakil bupati yang diinginkannya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa masyarakat Kecamatan Ulu Rawas menyatakan bahwa mereka memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilukada dikarenakan kepribadian atau figur dari kandidat yang dicalonkan. Masyarakat memilih salah satu Paslon bupati dan wakil bupati karena kepribadian atau figurnya yang baik, hal tersebut sangat penting. Jika kepribadian Paslon baik maka masyarakat akan mencontohnya karena masyarakat membutuhkan seorang figur pemimpin yang baik. Selain itu,

jika kepribadiannya baik, diharapkan bupati dan wakil bupati yang terpilih bisa melaksanakan kinerjanya secara bertanggungjawab dan amanah terhadap rakyatnya serta memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyatnya. Masyarakat Kecamatan Ulu Rawas juga berharap agar bupati dan wakil bupati yang terpilih tersebut, tidak melupakan visi dan misinya serta tidak melanggar janji-janji yang telah diucapkan kepada masyarakat saat kampanye dalam Pemilukada di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020.

Secara umum masyarakat Kecamatan Ulu Rawas juga merasa bahwa mereka memilih karena sudah memiliki kesadaran dari diri mereka sebagai warga negara yang baik untuk menggunakan hak pilihnya bukan karena imbalan atau hibah atau hadiah berupa uang atau bukan karena keuntungan jangka pendek. Sebab hal itu bisa saja menyebabkan terjadinya korupsi setelah paslon bupati dan wakil bupati tersebut menjabat menjadi bupati dan wakil bupati yang terpilih untuk memimpin di Kabupaten Musi Rawas Utara Meriah lima tahun ke depan dan dikarenakan uang. Masyarakat pemilih rasional ini memang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik yaitu lulusan SMA, Diploma, sarjana dan pasca sarjana. Mereka juga mempunyai pengetahuan politik yang lebih baik sebab mereka sering mengikuti dan melihat perkembangan berita politik yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara dan berita politik nasional.

Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Ulu Rawas merupakan masyarakat yang memiliki budaya politik partisipan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kecamatan Ulu Rawas memiliki keikutsertaan atau kepedulian terhadap negara dan daerahnya untuk ikut serta mengubah daerah dan

negaranya ini supaya menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan oleh mereka dengan cara mengikuti atau menggunakan hak pilihnya pada Pemilu di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020.

Namun demikian sebagian masyarakat menunjukkan sikap yang baik dan patut untuk ditiru oleh semua elemen masyarakat lain yaitu yang menggunakan hak pilihnya dikarenakan adanya kesadaran secara murni dari diri mereka untuk memilih calon bupati dan wakil bupati tanpa adanya embel-embel uang atau hibah berupa uang dari tim sukses para kandidat Paslon. Mereka menggunakan hak pilihnya dikarenakan adanya harapan supaya mereka mempunyai seorang bupati dan wakil bupati yang berkualitas, bertanggungjawab, amanah, peduli dengan kepentingan rakyat, jujur, dan tidak korupsi. Selain itu, mereka juga menginginkan adanya perubahan yang lebih baik serta adanya kemajuan untuk Kabupaten Musi Rawas Utara selama lima tahun mendatang.

3.3 Tipe Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan

orientasi itu pula, mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka dalam sistem politik.²⁸

Almond dan Verba mengatakan bahwa budaya politik memiliki tipe-tipe tersendiri. Melalui hasil penelitian mereka di lima negara, keduanya menyimpulkan bahwa terdapat tiga budaya politik yang dominan terdapat di tengah individu. Tipe budaya politik sendiri berarti jenis kecenderungan individu dalam sistem politik. Tipe-tipe budaya politik yang ada adalah:

a. Budaya Politik Parokial

Budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah atau merupakan tipe budaya politik dimana ikatan seorang individu terhadap sebuah sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Dalam tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Individu tidak mengharapkan perubahan apapun dari sistem politik. Ini diakibatkan oleh sebab individu tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah bangsa secara keseluruhan. Individu hanya merasa bahwa mereka terikat dengan kekuasaan yang dekat dengan mereka, misalnya suku mereka, agama mereka, ataupun daerah mereka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sepertinya masyarakat Ulu Rawas tidak menganut tipe budaya politik parokial. Berikut hasil wawancara dengan Arief mengenai keikutsertaan dalam pemilu:

“iya, saya termasuk pemilih dalam pemilu yang lalu, kebetulan saya termasuk tim sukses salah satu kandidat dalam pilukada yang lalu, kami

²⁸ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 96.

mengadakan berbagai macam kegiatan sosialisasi, menyalurkan bantuan dan lain-lain”.

Dari pernyataan diatas, peneliti melihat bahwa partisipasi masyarakat cukup antusias dalam kegiatan politik seperti pemilu. Hal serupa juga bisa kita lihat dalam wawancara dibagian sebelumnya yaitu dalam pembahasan mengenai orientasi kognitif. Disana terlihat pengetahuan masyarakat cukup baik dan partisipasi politiknya juga cukup tinggi.

Ciri-ciri budaya politik parokial adalah sebagai berikut:

1. Budaya politik ini berlangsung dalam masyarakat yang masih tradisional dan sederhana.
2. Belum terlihat peran-peran politik yang khusus, peran politik dilakukan serempak bersamaan dengan peran ekonomi, keagamaan, dan lain-lain.
3. Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan dalam masyarakatnya cenderung rendah.
4. Warga cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali yang ada disekitarnya.
5. Warga tidak banyak berharap atau tidak memiliki harapan-harapan tertentu dari sistem politik tempat ia berada.²⁹

Kesadaran politik masyarakat sangat diperlukan, karena masih ada sebagian masyarakat yang tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam memberikan suaranya. Bahkan masih banyak masyarakat yang tidak memilih/Golput. Golput merupakan hak setiap warga negara, namun sebagai warga negara yang baik

²⁹ Diakses di www.pengertianilmusistempolitik. Pada tanggal 10 Maret 2023

masyarakat harus mempunyai kesadaran untuk menjalankan hak sebagai warga negara dengan ikut berpartisipasi dalam proses pemilu agar terciptanya kemaslahatan umat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikut serta dalam proses politik yang bertujuan untuk membangun negara, maka akan semakin tinggi partisipasi masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan

b. Budaya Politik Subjek atau Kaula

Budaya politik yang tingkatannya lebih tinggi dari parokial. Dalam budaya ini individu merasa bahwa mereka adalah bagian dari warga suatu negara. Individu yang berbudaya politik subjek juga memberi perhatian yang cukup atas politik akan tetapi tidak angga atasnya, dalam arti, secara emosional mereka tidak merasa terlibat dengan negara mereka. Saat mereka tengah membicarakan masalah politik, cenderung ada perasaan tidak nyaman sebab mereka tidak mempercayai orang lain begitu saja. Saat berhadapan dengan institusi negara mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Dari uraian budaya politik subjek di atas, terlihat bahwa masyarakat Ulu Rawas masuk kedalam tipe budaya politik ini. Seperti wawancara dengan Ibu wiwin Suryani mengenai kesadaran dalam pemilu:

“Saya selalu berpartisipasi dalam pemilu dan saya sadar dengan apa yang menjadi pilihan saya itu merupakan kesadaran pribadi saya demi kemajuan daerah ini. Jika ada yang memberi uang saya terima, tapi saya tidak pasti memilih calon tersebut”.³⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pilihan politik mereka, namun mereka tidak mudah mempercayai orang lain begitu saja.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Wiwin Suryani Petani, 26 Januari 2023

Ciri-ciri budaya politik kaula/subjek adalah sebagai berikut:

1. Warga menyadari sepenuhnya akan otoritas pemerintah.
2. Tidak banyak warga yang memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, tetapi mereka cukup puas untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah.
3. Warga bersikap menerima saja putusan yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh dikoreksi, apalagi ditentang
4. Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif, artinya warga tidak mampu berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
5. Warga menaruh kesadaran, minat dan perhatian terhadap sistem politik pada umumnya dan terutama terhadap objek politik output, sedangkan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah.³¹

c. Budaya politik partisipan

Budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi iatas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak. Dari uraian tentang budaya politik partisipan tersebut, peneliti menilai bahwa masyarakat Ulu Rawas juga termasuk dalam budaya

³¹ Diakses di www.pengertianilmusistempolitik. Pada tanggal 10 Maret 2023

politik ini. Seperti yang diungkap oleh Puja mahasiswi mengenai tingkat partisipasi masyarakat setempat:

“Pada saat pemilu saya selalu ikut dalam kegiatan pemilu sebagai pemilih dan kadang-kadang juga sebagai panitia, 80% masyarakat selalu hadir dan memberikan suaranya di TPS. Saya dan keluarga juga selalu hadir saat proses pemilu berlangsung, karena partisipasi masyarakat itu sangat penting agar pemimpin yang kita unggulkan dapat terpilih. Walaupun nantinya pemenang pemilu belum tentu mampu menjalankan visi dan misinya dengan baik’’.³²

Dari pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat sangat antusias karena 80% masyarakat hadir saat pemilu dan mereka berpartisipasi aktif dalam proses politik berlangsung

Ciri-ciri budaya politik partisipan adalah sebagai berikut:

- a. Warga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya dan mampu mempergunakan hak itu serta menanggung kewajibannya.
- b. Warga tidak menerima begitu saja keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik keseluruhan, input, output maupun posisi dirinya sendiri.
- c. Anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik
- d. Masyarakat menyadari bahwa ia adalah warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.
- e. Kehidupan politik dianggap sebagai sarana transaksi, seperti halnya penjual dan pembeli. Warga dapat menerima berdasarkan kesadaran, tetapi juga mampu menolak berdasarkan penilaiannya sendiri.

³² Hasil Wawancara dengan Puja, Mahasiswi, 25 Januari 2023

Kaitannya dengan budaya politik Almond dan verba, pada umumnya kecenderungan budaya politik masyarakat Ulu Rawas tergolong kedalam budaya politik subjek/kaula dan Partisipan. Pengetahuan masyarakat mengenai politik cukup baik, mereka juga ikut serta dalam proses dan berpartisipasi saat pemilu dan mereka paham sekali dengan kepemimpinan yang baik. Masyarakat menyadari pilihan politik mereka, namun mereka tidak mudah mempercayai orang lain begitu saja. Masyarakat Ulu Rawas menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah dan mereka cukup puas atas putusan pemerintah yang menurut mereka tidak bisa ditentang. Partisipasi politik masyarakat sangat antusias karena 80% masyarakat hadir saat pemilu dan mereka berpartisipasi aktif dalam proses politik berlangsung. Anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah dibahas sebelumnya, beberapa hal yang dapat kita ketahui mengenai budaya politik Masyarakat Ulu Rawas adalah sebagai berikut.

1. Budaya politik yang ada pada masyarakat kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilu tahun 2020 mempunyai ciri budaya politik partisipan dengan menunjukkan partisipasi politik yang tinggi. Alasan masyarakat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu tahun 2020 adalah sebagian besar karena faktor kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Orientasi budaya politik yang terdapat di Kecamatan Ulu Rawas secara umum berdasarkan budaya politik partisipan, parokial serta subjek.
2. Berdasarkan analisis penulis, secara umum dapat diketahui bahwa politik Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 termasuk ke dalam budaya politik subjek-partisipan. Masyarakat Ulu Rawas memiliki pemahaman mengenai sistem politik, tetapi keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan politik termasuk pasif, begitu pula pada saat Pilkada Langsung Tahun 2020. Ketika membicarakan persoalan input dalam sistem politik, masyarakat

4.2 Saran

1. Masyarakat Ulu Rawas diharapkan mampu menyaring informasi-informasi politik secara bijak, sehingga keterbukaan masyarakat terhadap politik mampu selaras dengan kestabilan keadaan budaya politik masyarakat.
2. Masyarakat Ulu Rawas diharapkan bisa lebih aktif dalam berbagai kegiatan politik di wilayah yang lebih luas agar dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan bersama termasuk ketika dilaksanakan Pemilu, sehingga akan menciptakan kerja sama yang baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfian. (1981). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. (Jakarta: Gramedia).
- Affan Gaffar. (1996) *.Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. (Jakarta : Grafindo).
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Imam Gunawan. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Kemenkumham. *Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.9 No.4 Desember 2014. Hal.509.
- Hening Suryo. *Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang : Suatu Perbandingan*. *Jurnal Transformasi* 1 (27): 1-47. 2015.

C. Internet

- Rumah Pemilu.2014. "Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014". Diakses pada <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>.
- <https://muratarakab.go.id/page/sejarah-singkat-kabupaten-musi-rawas-utara>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2021, pukul 14.26

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Bapak Ahmad Staf KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Tanggal Wawancara : 24 November 2022

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

1. Apa saja yang dimaksud dengan budaya politik menurut Bapak?
2. Bagaimana budaya politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Musi Rawas Utara?
3. Apa visi dan misi Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020?
4. Apakah ada strategi yang dapat menyakinkan masyarakat agar memilih calon yang mampu membawa daerah menjadi lebih maju?
5. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020?

Narasumber : Bapak Kevin Staf KPU Musi Rawas Utara

Tanggal Wawancara : 24 November 2022

1. Bagaimana budaya politik masyarakat pada Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Apa yang dilakukan jajaran/staf KPU dalam meningkatkan partisipasi politik?
3. Apakah ada usaha yang dilakukan untuk meningkat angka partisipasi politik untuk pemilihan yang akan datang?
4. Apakah ada perbedaan tingkat partisipasi politik sebelumnya, lalu apa?

Narasumber : Masyarakat/Mahasiswa

Tanggal Wawancara : 25 Januari s/d 26 Januari 2023

1. Apakah anda mengetahui siapa saja Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara pada Periode 2020-2024?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap masing-masing calon kandidat ?
3. Sosok pemimpin seperti apa yang anda harapkan untuk memimpin Kabupaten Musi Rawas Utara?
4. Bagaimana cara kandidat dalam mendekatkan diri dan komunikasi kepada masyarakat?
5. Menurut anda faktor apa sajakah yang menentukan pilihan seseorang pada kandidat yang terpilih?
6. Bagaimana budaya politik calon dan pemilih dalam menentukan pimpinannya?

Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian di KPU Musi Rawas Utara



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km. 65 Desa Noman
Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Rupit, 26 Januari 2023

Nomor : 12 /PL.02-SD/1613/2023
 Lampiran :-
 Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

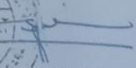
Yth. Ketua Universitas Jambi Fakultas Hukum
 Di –
 Jambi

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Nomor 4763/UN21.4/KM.05.01/2022 tentang izin Penelitian dan permintaan data skripsi yang berjudul "Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan nama siswa sebagai berikut:

Nama	: Miftahul Jannah
Nomor Mahasiswa	: HIB118042
Program Studi	: Ilmu Politik
Untuk Melaksanakan	: Penelitian/Riset
Judul Skripsi	: Budaya Politik Masyarakat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,



SYAMSIAH

DOKUMENTASI



Gambar 4.1 Dokumentasi Bupati Musi Rawas Utara terpilih .



Gambar 4.2 Dokumentasi Bersama Bapak Ahmad Staf KPU Musi Rawas Utara.



Gambar 4.3 Dokumentasi Bersama Bapak Kevin Staf KPU Musi Rawas Utara .



Gambar 4.4 Dokumentasi Bersama Warga Kecamatan Ulu Rawas (Wiwin Suryani)



Gambar 4.5 Dokumentasi Bersama Warga Ulu Rawas (Rahayu)



Gambar 4.6 Dokumentasi Bersama Mahasiswi Ulu Rawas (Puja) .



Gambar 4.7 Dokumentasi Bersama Arief
Mahasiswa Ulu Rawas

CURRICULUM VITAE



I. Data Diri

1. Nama : Miftahul Jannah
2. Tempat dan tanggal lahir : Desa Jangkat, 11 November 1999
3. Nim : H1B118042
4. Agama : Islam
5. Jenis kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Kawin
7. Warga Negara : Indonesia
8. Alamat KTP : Kec. Ulu Rawas, Dusun 1 Jangkat,
RT. 03, RW. 03
9. No. Telepon : 083187105249
10. Alamat Sekarang : Mandalo Asri
11. E-mail : miftahuljannah123@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)	Sekolah/ Universitas	Jurusan/Prodi	Masa Pendidikan
2006- 2012	SDN Desa Jangkat	-	6 Tahun
2012- 2015	MTS N Lubuk Linggau	IPS	3 Tahun
2015- 2018	MAN 2 Lubuk Linggau	IPS	3 Tahun
2018- Sekarang	Universitas Jambi	Ilmu Politik	